




RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN | 2021
KABUPATEN KETAPANG

 (0534) 32253

 dinkes@ketapangkab.go.id

 Jl. D.I. Panjaitan No. 40 Kodepos 78851

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 ini dapat di selesaikan.

Penyusunan Renja dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kab. Ketapang. Pemahaman yang cermat terhadap program strategis Pemerintah Kab. Ketapang maupun langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang disusun agar dijadikan pedoman untuk Bidang dan Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan agar kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mengarah pada pencapaian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Ketapang, 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang,



H. RUSTAMI, SKM., M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630512 198511 1 003

DAFTAR ISI

	hlm
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	10
1. Maksud	10
2. Tujuan	10
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan	12
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	30
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	32
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
B. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan	57
C. Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
BAB V PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

	hlm
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Ketapang	13
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.....	31
Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	33
Tabel 2.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang	34
Table 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ketapang	38
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Ketapang	51
Table 3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan	56
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang	59
Tabel 3.3 Hasil Mapping Fokus Kegiatan terhadap Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020	61

Table 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Ketapang	65
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era reformasi urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 tahun 2004. Pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam urusan *concurrent* (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Selain dari itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 dan Permenkes Nomor 4 tahun 2019 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Kabupaten Ketapang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Ketapang adalah ± 31.588 km² atau 21,3 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan masih merupakan Kabupaten terluas di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang terdiri atas 20 Kecamatan dengan 9 Kelurahan dan 253 Desa.

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kendawangan dengan luas wilayah $\pm 5.859 \text{ km}^2$ atau 18,55% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Ketapang, sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Delta Pawan yaitu $\pm 74 \text{ km}^2$ atau 0,23% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ketapang periode 2021-2026 adalah "**Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Yang Sejahtera**". Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam enam misi. Dinas Kesehatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Kesehatan di suatu Wilayah. Sehingga terkait dengan Visi dan Misi diatas, Dinas Kesehatan mempunyai tujuan dari misi ketiga yaitu: "**Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing**". Selain dari itu, dalam menjalankan kepemimpinannya Bupati dan Wakil Bupati Ketapang memiliki program prioritas yang tertuang didalam lima panca karya. Dinas kesehatan melaksanakan panca karya "**Ketapang Sehat**" yang merupakan panca karya yang pertama.

Secara umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang telah menunjukkan berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) orang di Kabupaten Ketapang telah naik mengikuti tren kenaikan AHH global. Pada tahun 2015 AHH orang Ketapang sebesar 70.51 dan naik menjadi 71.10 pada tahun 2020. Pendekatan terbaru tidak semata-mata untuk melihat tahun hidup (AHH), namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (*Healthy Adjusted Life Expectancy/HALE*). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya jika di kaitkan dengan AHH orang di Kabupaten Ketapang, maka terdapat 8,45 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Permasalahan lain yang ada di Kabupaten Ketapang yakni masih terdapat kecenderungan naik turun untuk Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). *Prevalensi stunting* pada balita sudah cenderung menurun namun penurunan *prevalensi stunting* belum terlihat secara *signifikan*. Selain dari itu, jika dilihat dari beban penyakit di Kabupaten Ketapang mengalami beban ganda, di satu sisi Penyakit Tidak Menular (PTM) naik dengan *signifikan*, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko penyakit *zoonosis* (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (*new emerging diseases*). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit yang baru muncul, khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan yang mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit *zoonosis*, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Melihat tingginya mobilisasi keluar masuk tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri dan terbukanya transportasi di Kabupaten Ketapang berpotensi masuknya agen penyakit baru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pelaksanaan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan melalui perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terarah dan sistematis. Perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021–2026 dan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2022 yang diperoleh melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan dilakukan mulai pada tingkat Desa/ Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten serta memperhatikan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrenbang Tingkat Provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan merupakan dokumen awal perencanaan pembangunan kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini memuat kerangka program, kegiatan dan pendanaannya. Dengan tersusunnya rencana kerja tahunan ini diharapkan menjadi arah pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang tahun 2022 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
38. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 21);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan;
- b. terselenggaranya pembangunan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2022).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. mendiskripsikan program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
- b. menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
- c. menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan;
- d. meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat;
- e. menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan, dan Penelaahan Usulan Program Masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan menguraikan Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan serta Program dan Kegiatan dari Dinas Kesehatan.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
- BAB V Penutup, menguraikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan

Kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat diketahui berdasarkan laporan hasil kinerja dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penetapan kebijakan pembangunan di Kabupaten Ketapang didasarkan kepada analisis berbagai potensi yang dimiliki dan kendala yang dihadapi, serta kebijakan pembangunan nasional bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel Tabel 2.1 (T-C.29) di bawah ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7*9)	11 = (10/4)	
1.02	URUSAN WAJIB KESEHATAN									
1.02.01	DINAS KESEHATAN		327.572.065.770,00					269.540.949.777,00		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	108.480.994.100,20	-	-	-	-	81.340.890.953,00	-	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495.000.000,00	-	-	-	-	450.000.000,00	-	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	220.000.000,00					200.000.000,00		
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	275.000.000,00					250.000.000,00		
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.834.189.996,20	-	-	-	-	57.781.564.283,00	-	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	80.614.189.996,20					57.581.564.283,00		
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Pemasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Pemasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	55.000.000,00					50.000.000,00		
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.000.000,00					50.000.000,00		
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	110.000.000,00					100.000.000,00		
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								
1 02 01 2.05 02	Persediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah Persediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.000.000,00	-	-	-	-	640.000.000,00	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000,00					100.000.000,00		
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor	110.000.000,00					100.000.000,00		
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	82.500.000,00					75.000.000,00		
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.500.000,00					15.000.000,00		
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah dokumen laporan hasil konsultasi dan koordinasi	385.000.000,00					350.000.000,00		
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	242.000.000,00					220.000.000,00		
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/jabatan	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/jabatan								
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan								
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	- Jumlah Mebel	165.000.000,00					150.000.000,00		
1 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.000.000,00					70.000.000,00		
1 02 01 2.08	Penyediaan jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	3.415.014.900,00					3.104.559.000,00		
1 02 01 2.08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Tata Administrasi surat menyurat	44.095.700,00					40.087.000,00		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	825.000.000,00					750.000.000,00		
1 02 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Penyediaan Gaji Tenaga Administrasi dan Cleaning Service	2.545.919.200,00					2.314.472.000,00		
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	2.012.252.000,00					1.829.320.000,00		
1 02 01 2.09 01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Tejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/jabatan	- Jumlah kendaraan dinas perorangan dan jabatan yang dilakukan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak untuk kurun waktu 1 tahun	110.000.000,00					100.000.000,00		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dilakukan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak untuk kurun waktu 1 tahun	88.000.000,00					80.000.000,00		
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	88.000.000,00					80.000.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/9)
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung / kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan rehabilitasi	1.616.252.000,00					1.469.320.000,00		
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung / kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan rehabilitasi	55.000.000,00					50.000.000,00		
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung / kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan rehabilitasi	55.000.000,00					50.000.000,00		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	- Jumlah Pelayanan BLUD	20.778.537.204,00	-				17.315.447.670,00		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BLUD	20.778.537.204,00					17.315.447.670,00		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		219.091.071.669,80	-				188.200.058.824,00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		187.832.358.454,00	-				166.349.175.688,00		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Rasio RS per 100.000 penduduk - Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk - Persentase prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan lainnya	115.659.102.575,70					110.668.138.978,00		
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Jumlah RS beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang dibangun (paket)	33.000.000.000,00					30.000.000.000,00		
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan sesuai standar nasional (paket)	20.113.519.305,00					24.461.839.550,00		
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (paket)	6.548.576.595,00					5.953.251.450,00		
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun (unit)	1.965.271.660,00					1.786.610.600,00		
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	- Jumlah Pengembangan Puskesmas								
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (paket)	363.000.000,00					330.000.000,00		
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	110.000.000,00					100.000.000,00		
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	11.002.802.027,80					10.002.547.298,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7*9)	11 = (10/9)
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan (paket)	29.667.893.799,50					26.970.812.545,00		
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melakukan kalibrasi alat kesehatan	329.010.000,00					299.100.000,00		
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	- Jumlah ketersediaan obat dan vaksin esensial - Jumlah pelaksanaan monitoring di fasilitas pelayanan kesehatan tentang ketersediaan dan penggunaan obat dan vaksin esensial - Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang dilakukan evaluasi penggunaan Obat Rasional - Jumlah ketersediaan obat penanganan Covid-19	3.555.577.991,00					2.579.021.901,00		
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	- Jumlah Ketersediaan Bahan Habis Pakai - Jumlah Ketersediaan Bahan Habis Pakai Penanganan COVID-19 - Jumlah pembelian BMHP TB (Catridge TCM) - Jumlah pembelian BMHP HIV (RDT HIV Sifilis) - Jumlah pembelian BMHP Larvasida Malaria	5.961.057.111,90					5.419.142.829,00		
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.042.394.085,50					2.765.812.805,00		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita - Persentase Desa/Kelurahan UCI - Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi dan Tercapainya Imunisasi Lanjutan Pada bayi - Tercapainya Jumlah Kelurahan/ Desa yang dilakukan Sweeping Imunisasi - Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) Pada Balita - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	70.872.487.165,80					55.245.443.335,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana kasus pneumoniae seksual standar - Persentase Puskesmas yang memiliki mesin fogging - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana GHPR sesuai standar 100% - Persentase Puskesmas API < 1 per 1000 penduduk sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko sebesar 100% - Persentase Kecamatan dengan eradikasi frambusia 100% - Cakupan FKTP yang melakukan pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai standar - Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas - Persentase kunjungan pemeriksaan laboratorium pelayanan kesehatan kegawatdaruratan - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K4) - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan penangan komplikasi pada kehamilan - Jumlah pelaksanaan Pengkajian Audit Kematian Maternal-Perinatal Tingkat Kabupaten - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang Pelayanan - Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil - Jumlah ibu hamil yang terjarang (K1) - Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan penangan komplikasi pada persalinan 	508.497.000,00					462.270.000,00		
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan penangan komplikasi pada persalinan 	3.841.016.300,00					3.491.833.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7+9)	11 = (10/9)
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah ibu bersalin misidin yang mendapatkan pertolongan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan - Jumlah ibu hamil/ bersalin/neonatus miskin yang mendapatkan pelayanan penanganan komplikasi - Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang tersedia di wilayah Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Ketapang - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN3) - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan penanganan komplikasi - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan Kesehatan Balita - Jumlah anak usia sekolah yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah Pelayanan Posbindu di Puskesmas - Jumlah Pelayanan deteksi dini gangguan indera di Puskesmas - Penyediaan media KIE/ Buku Faktor Resiko PTM - Jumlah Kegiatan Money PTM ke Puskesmas - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan skrining kesehatan pada pelayanan posbindu dan skrining kanker - Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pelaksanaan program PTM (indra, kanker, KTR) 	500.478.000,00				9	454.980.000,00	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan Kesehatan Balita - Jumlah anak usia sekolah yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah Pelayanan Posbindu di Puskesmas - Jumlah Pelayanan deteksi dini gangguan indera di Puskesmas - Penyediaan media KIE/ Buku Faktor Resiko PTM - Jumlah Kegiatan Money PTM ke Puskesmas - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan skrining kesehatan pada pelayanan posbindu dan skrining kanker - Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pelaksanaan program PTM (indra, kanker, KTR) 	233.013.000,00					211.830.000,00	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan Kesehatan Balita - Jumlah anak usia sekolah yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah Pelayanan Posbindu di Puskesmas - Jumlah Pelayanan deteksi dini gangguan indera di Puskesmas - Penyediaan media KIE/ Buku Faktor Resiko PTM - Jumlah Kegiatan Money PTM ke Puskesmas - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan skrining kesehatan pada pelayanan posbindu dan skrining kanker - Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pelaksanaan program PTM (indra, kanker, KTR) 	253.952.613,20					230.866.012,00	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan Kesehatan Balita - Jumlah anak usia sekolah yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah Pelayanan Posbindu di Puskesmas - Jumlah Pelayanan deteksi dini gangguan indera di Puskesmas - Penyediaan media KIE/ Buku Faktor Resiko PTM - Jumlah Kegiatan Money PTM ke Puskesmas - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan skrining kesehatan pada pelayanan posbindu dan skrining kanker - Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pelaksanaan program PTM (indra, kanker, KTR) 	2.841.052.633,80					1.993.676.358,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/9)
1 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Jumlah usia lanjut yang diberikan layanan sesuai standar	420.795.113,20					382.541.012,00		
1 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Hipertensi - Tersedianya alat skrining / pemeriksaan penderita Hipertensi sesuai standar	629.100.000,00					157.200.000,00		
1 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	- Jumlah Pelayanan terpadu (PANDU) PTM Puskesmas - Jumlah Kampanye pengendalian gula garam dan lemak Tingkat Puskesmas - Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Diabetes mellitus - tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan penderita diabetes mellitus sesuai standar	565.905.000,00					104.950.000,00		
1 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ODGJ berat - Jumlah kegiatan Advokasi dan sosialisasi TPKJM - Jumlah pasien ODGJ berat yang di rujuk ke RSJ - Jumlah Puskesmas yang melayani rawat Jiwa - Jumlah penyediaan media KIE	1.736.656.000,00					685.238.250,00		
1 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar - Jumlah penemuan kasus TBC anak - Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati - Jumlah Penderita TB yang mengetahui status HIV - Jumlah Pengobatan TB MDR - Jumlah penderita TB yang diobati dan sembuh - Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis	357.390.000,00					324.900.000,00		
1 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV dites HIV - Jumlah orang yang dites dan mengetahui status HIV/AIDSnya - Jumlah ODHA yang mengetahui status HIV dan memulai pengobatan ARV - Jumlah Ibu Hamil yang di skrining HIV - Jumlah Penderita TB yang di tes HIV	384.285.000,00					349.350.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/9)
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	- Jumlah Wilayah Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	78.441.000,00					71.310.000,00		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan - Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapatkan pemantauan kunjungan rumah - Jumlah Balita 6 - 59 Bulan Mendapat Kapsul Vitamin A - Jumlah Posyandu yang mendapat sweeping Vitamin A - Jumlah Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S) - Jumlah Kader yang mengikuti kegiatan Refresing Kader Posyandu - Jumlah Balita ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D) - Jumlah Balita dengan Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) - Jumlah Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi buruk pada Balita - Jumlah Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif - Jumlah Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif - Jumlah balita yang tercacak gizi buruk - Jumlah Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan - Jumlah Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Pemantauan Kunjungan Rumah - Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan - Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Pemantauan Kunjungan Rumah - Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan - Jumlah Remaja Putri yang mendapat pemeriksaan HB - Jumlah Remaja Putri Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	2.498.593.316,00						2.271.448.469,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/9)
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Anak Stunting yang diukur - Jumlah Puskesmas Yang Mengikuti Pertemuan PSG dalam rangka penentuan kluster - Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Status Gizi Balita (PSG) - Jumlah Sekolah yang menjadi sampel pengambilan garam beryodium - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga 	367.796.660,00					334.360.600,00		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Desa Pemucian STBM - Jumlah sarana air minum memenuhi syarat - Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (Jamban sehat) - Jumlah tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan - Jumlah tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan klinik sanitasi - Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan - Distribusi bahan keperluan pasien covid-19, bahan desinfeksi covid-19 dan penangulangan covid-19 dan lokasi/tempat penyemprotan terkonfirmasi covid-19 - Jumlah calon jamaah haji yang melaksanakan senam kebugaran 	3.026.009.052,00					2.750.917.320,00		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Posbindu PTM yang melaksanakan pelayanan - Jumlah tema penyuluhan dan media promosi dan informasi kesehatan - Jumlah alat dan sarana promosi dan informasi kesehatan - Jumlah desa yang membentuk kader PHBS - Jumlah desa siaga di Kabupaten 	3.596.664.069,00					3.276.512.790,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/9)
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	216.779.200,00					197.072.000,00		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Berpotensi Wabah - Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pembinaan kasus berpotensi KLB - Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi - Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas yang mendapat pelatihan pengolahan data - Jumlah Petugas/tracer/kader yang mendapatkan Pelatihan - Jumlah Petugas yang mendapatkan APD - Jumlah Desa yang mendapatkan spanduk - Jumlah Puskesmas yang melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit - Jumlah kasus yang terlaicak dan terpantau - Jumlah nakes yang melakukan pemantauan harian pada pasien - Jumlah Puskesmas yang melakukan pemantauan harian pada pasien - Jumlah tracer Puskesmas yang melakukan pemantauan KE - Jumlah petugas surveilans yang melakukan penginputan data - Jumlah nakes yang mendapatkan insentif - Jumlah kegiatan vaksinasi massal - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Alkes - Jumlah kegiatan vaksinasi Covid-19 - Jumlah OJT/ On Jobs Training) - Peningkatan Imunisasi untuk Petugas dan Kader Puskesmas - Jumlah pelaksanaan imunisasi bayi dan balita di posyandu - Jumlah Desa yang melaksanakan sweeping imunisasi	25.898.340.418,00					22.426.936.418,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7*9)	11 = (10/9)
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) - Jumlah sarana penyimpanan vaksin dan distribusi vaksin rantai dingin - Jumlah kegiatan Money survim - Jumlah kegiatan deteksi dini masalah kesehatan jiwa di sekolah dan kelompok masyarakat - Jumlah kegiatan peningkatan SDM penanggulangan masalah kesehatan jiwa di masyarakat 	371.345.320,00					159.025.660,00	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan jiwa dan Napza 	238.494.400,00					125.904.000,00	
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah wilayah yang mendapat pelayanan kesehatan di daerah terpencil 	143.750.000,00					125.000.000,00	
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang memiliki wilayah rawan bencana melakukan mitigasi bencana - Jumlah Wilayah yang terkena bencana dilakukan pelayanan kesehatan pasca bencana 	55.000.000,00					50.000.000,00	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RT yang melakukan sosialisasi dan Implementasi GIRLI - Jumlah Kasus DBD yang dilakukan Fogging Fokus Sesuai rekomendasi FE - Jumlah Puskesmas Yang melakukan Pemantauan Jentik Berjala - Jumlah Kasus Kronis yang ditemukan dan dilakukan tata laksana kasus sesuai SOP - Jumlah Puskesmas yang melakukan Survey darah Jari - Jumlah Anak usia 1-12 tahun minum obat cacing - Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan Faeces pada trimester ke dua - Jumlah bayi balita batuk /kesuburan bernafas yang di ukur TDDK - Jumlah Puskesmas yang melaporkan orang dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah endemis malaria - Jumlah Puskesmas yang mengikuti kegiatan Reorientasi Eliminasi Malaria 	3.121.591.700,00					1.934.817.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7*8)	11 = (10/4)	
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat	- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar - Jumlah Puskesmas melakukan survey bercak dan survey kontak-kusta - Jumlah Puskesmas melakukan pemeriksaan frambusia - Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan PBI daerah - Jumlah peserta BPJS Kelas III mandiri yang mendapatkan subsidi APBD - Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan <i>Telemedicine</i> - Jumlah laporan dan rekomendasi hasil penelitian	9.847.828.142,00					8.999.941.420,00		
1 02 02 2.02 30	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.900.000.000,00					7.095.000,00		
1 02 02 2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan		109.999.829,50					99.999.845,00		
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		929.298.899,10					844.817.181,00		
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		2.950.414.500,00					2.682.195.000,00		
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		2.250.000.000,00					38.456.000,00		
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		623.268.712,50					381.153.375,00		
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		204.000.000,00							
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		309.269.614,50					281.154.195,00		
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		109.999.098,00					99.999.180,00		
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		677.500.000,00					54.440.000,00		
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		100.000.000,00					2.395.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10 = (5+7-9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Rumah Sakit yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute)	15.000.000,00						
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah FKTP yang melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan - Jumlah RS yang melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan - Jumlah Klinik Pratama yang memenuhi persyaratan peningkatan mutu pelayanan kesehatan	435.000.000,00						
1.02.02.2.04.04	Penyediaan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Jumlah FKTP dengan rasio Rujukan kurang sama dengan 2% - Jumlah FKTP yang menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (Sisrute) - Jumlah laboratorium Kesehatan dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	127.500.000,00					52.045.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	JUMLAH DOKUMEN DAN / REGULASI YANG DITERBITKAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	30.338.381.215,80					21.252.895.136,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktek	120.000.000,00					99.999.620,00	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	- Jumlah pemberian rekomendasi dan pengawasan praktek nakes	120.000.000,00					99.999.620,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang memiliki Tenaga Kesehatan sesuai Standar	26.914.381.215,80					20.553.370.166,00	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	- Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	26.589.381.215,80					20.453.370.166,00	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan SDMK - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	325.000.000,00					100.000.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang diberikan Pelatihan dan Uji Kompetensi	3.304.000.000,00					599.525.350,00	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	- Jumlah pelatihan dan pendidikan kesehatan yang diselenggarakan	3.304.000.000,00					599.525.350,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan makes - Jumlah peserta diklat Penguji Uji Kompetensi - Jumlah peserta diklat manajemen Puskesmas - Jumlah peserta diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas - Jumlah peserta diklat Plebotomi - Jumlah peserta diklat K3 - Jumlah peserta diklat Distric Food Inspector - Jumlah peserta diklat mikroskopis ATLM - Jumlah peserta workshop uji komp - Jumlah peserta workshop penyusunan profil SDMK - Jumlah peserta workshop Audit Internal Laboratorium - Jumlah peserta workshop Kelabotorium - Jumlah peserta peningkatan kapasitas makes dalam PONEE - Jumlah peserta magang ke Laboratorium Klinik - Jumlah peserta magang penempatan mutu di BBLK 									
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	JUMLAH PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	519.789.600,00					472.536.000,00			
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah validitas perizinan sarana pelayanan kefarmasian	149.901.400,00					136.274.000,00			
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengendalian dan Pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian - Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 	101.200.000,00					92.000.000,00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah sarana yang dilakukan validasi perizinan sarana pelayanan kefarmasian	22.493.900,00					20.449.000,00		
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah fasilitasi perizinan sarana pelayanan kefarmasian	26.207.500,00					23.825.000,00		
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi Alkes dan PKRT								
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- Jumlah Peserta yang memiliki sertifikat produksi Alkes dan PKRT								
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang mendapatkan sertifikat layak produksi	213.779.500,00					194.345.000,00		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) - Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang mendapatkan pengawasan dalam rangka pemberian SPP-IRT	213.779.500,00					194.345.000,00		
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase hasil pemeriksaan uji laboratorium pada produk makanan minuman industri rumah tangga	156.108.700,00					141.917.000,00		
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	- Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan pengawasan - Jumlah sampling dan pengujian Pangan Industri Rumah Tangga Pangan	156.108.700,00					141.917.000,00		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2021		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	400.542.400,00	-	-	-	-	125.452.000,00	-	-
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Komitmen, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	150.542.400,00	-	-	-	-	125.452.000,00	-	-
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Komitmen dan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 - Jumlah Instansi yang berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19	150.542.400,00	-	-	-	-	125.452.000,00	-	-
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Jumlah desa yang melaksanakan kluster Germas	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Jumlah kader Saka Bakti Husada yang dibina	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian pembangunan di Kabupaten Ketapang pada urusan kesehatan dapat dilihat melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Ketapang pada tahun 2015 sebesar 70.51 menjadi 71.10 pada tahun 2020. Meskipun demikian, AHH Kabupaten Ketapang lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Indonesia pada tahun 2015-2020. Hal tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

Selain dari itu, berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan terdapat 12 Indikator jenis layanan yang harus dipenuhi. Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan. Dimana capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (*seratus persen*). Saat ini di Kabupaten Ketapang belum ada indikator kinerja SPM yang mencapai target.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Ketapang, Dinas Kesehatan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU Dinas Kesehatan dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan. Berdasarkan target Renstra Tahun 2016-2021 terdapat 6 (enam) IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Dimana pencapaian pada tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai target. Hasil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30) di bawah ini:

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Analisis isu-isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu penting terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diantaranya peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan *stunting*, pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan, Integrasi kepesertaan JKN, Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta pemulihan dampak kesehatan Pasca Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Isu-isu penting dirumuskan dalam hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan. Secara rinci pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan kesehatan seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1	2	3	
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	Rendahnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga Kesehatan	
		Rendahnya cakupan kunjungan K1	
		Rendahnya cakupan kunjungan K4	
	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	Tingginya persentase bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 1	
		Rendahnya cakupan Kunjungan Neonatal (KN) 3	
	Rendahnya kualitas kesehatan balita	Tingginya persentase balita gizi buruk	
		Tingginya persentase balita gizi kurang	
	Tingginya prevalensi stunting	Tingginya persentase ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronik (KEK)	
		Rendahnya persentase Desa yang melaksanakan STBM	
		Kurangnya penerapan PHBS	
	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	Tingginya angka kesakitan penyakit menular	
		Tingginya kesakitan penyakit tidak menular	
		Rendahnya cakupan masyarakat yang memiliki sistem jaminan Kesehatan	
	Masih tingginya kasus COVID-19	Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan jiwa	Rendahnya edukasi terkait pencegahan COVID-19 kepada masyarakat
			Rendahnya penegakan disiplin terkait protokol kesehatan (prokes) COVID-19
			Rendahnya rasio test dan tracing Covid-19
			Rendahnya frekuensi update dan release data COVID-19 per minggu
Minimnya ruang isolator di RSUD dr. Agoesdjam			
Minimnya pembaruan dan publikasi data COVID-19			
Rendahnya SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan			
Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan	Masih adanya fasilitas kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan obat dan vaksin esensial	Rendahnya persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	
		Rendahnya persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Standar Kemenkes	

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dijabarkan seperti tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Ketapang

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1	Rendahnya kualitas kesehatan ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya wilayah Kabupaten Ketapang - Sarana Prasarana layanan kesehatan belum memadai dan masih ada Desa belum memiliki Poskesdes atau Bidan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang
2	Rendahnya kualitas kesehatan bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah, jenis dan distribusi SDM Kesehatan belum merata - Alur Sistem rujukan masih belum sesuai karena terhambat oleh infrastruktur yang kurang mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan DAK Fisik dan Non Fisik dalam upaya penurunan AKI dan AKB - Meningkatnya upaya pihak swasta dalam upaya pemberian layanan kesehatan melalui penderian Klinik Swasta Perusahaan
3	Rendahnya kualitas kesehatan balita	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan Kesehatan masih kurang - <i>Policy/ Regulasi</i> masih kurang - Koordinasi lintas program belum terpadu - Adat istiadat yang memberi pengaruh <i>negative</i> pada perilaku masyarakat 	
4	Tingginya <i>prevalensi stunting</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum pernah dilakukan kajian faktor risiko kejadian stunting di Ketapang sehingga saat ini belum diketahui secara pasti faktor penyebab utama kejadian stunting di Ketapang - Belum adanya regulasi pada tingkat daerah yang mendukung upaya penanggulangan stunting - Koordinasi lintas program belum terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan DAK Fisik dan Non Fisik dalam upaya penanggulangan Stunting

No	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
5	Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan lingkungan yang begitu pesat yang dapat memunculkan <i>re emerging diseases</i> - Policy/Regulasi masih kurang - Jaminan kesehatan belum menjadi kebutuhan bagi masyarakat - Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) - Belum tersedianya Tenaga Dokter Spesialis Jiwa di tingkat Kabupaten dan tenaga perawat jiwa di Puskesmas - Belum ada Puskesmas Rawat Jiwa di Tingkat Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi pelaksanaan program berkembang sehingga memunculkan tools baru yang memudahkan pelaksanaan program - Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program-program kesehatan dengan adanya kader kesehatan di setiap Kelurahan/Desa - Jumlah sebaran Posbindu yang semakin meningkat - Dukungan lintas sektor untuk pelaksanaan program dan peluang integrasi dengan program lain
6	Masih tingginya kasus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya mobilisasi masyarakat - Adanya tenaga kerja asing mobilisasi yang keluar masuk ke Kabupaten Ketapang - Adanya potensi masuknya penyakit dari luar karena akses transportasi dari luar yang mudah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - Dukungan lintas sector sudah mulai berjalan baik
7	Rendahnya Mutu Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan akreditasi pada Puskesmas - Keterbatasan SDM sebagai tim pendamping Akreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya tuntutan jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat - Permenkes nomor tentang 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri dokter dan Tempat Praktek Mandiri dokter gigi - Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

2. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan

Globalisasi merupakan tantangan maupun ancaman bagi kesehatan masyarakat. Perlu kesiapan tenaga kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi (MEA).

Salah satu peluang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ketapang, yakni saat ini terdapat sebanyak 74 perusahaan perkebunan yang tersebar di 18 Kecamatan. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan program kesehatan secara terintegrasi yang melibatkan dunia usaha berupa peningkatan pemberdayaan sosial dan lingkungan perusahaan di bidang kesehatan. Sudah terdapat Peraturan bersifat operasional dan mengatur secara spesifik fungsi dan peran pihak perusahaan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang hingga pada tingkat Kecamatan dan Desa. Dengan meningkatnya peran pihak perusahaan diharapkan akan terjadi keterpaduan, koordinasi dan kerjasama sektoral yang lebih intens dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

3. Formulasi isu-isu penting

Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah **“Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil review terhadap rancangan awal RKPD untuk OPD Dinas Kesehatan diketahui bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD sehingga telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Secara rinci review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Ketapang untuk Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.5 (T-C.31) di bawah ini :

Tabel 2.5 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebuahan					Catatan Penting	
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.02	URUSAN WAJIB KESEHATAN					URUSAN WAJIB KESEHATAN						
1.02.01	DINAS KESHATAN				327.572.065.770,00	DINAS KESHATAN				219.091.071.669,80		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Persentase Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu			108.480.994.100,20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			495.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			450.000.000,00		
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	8	220.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	8	450.000.000,00		
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	6	275.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	6			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80.834.185.996,20	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80.250.000.000,00		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan/aji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya Laboratorium Kesehatan Daerah	Seluruh ASN	80.014.189.996,20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya Laboratorium Kesehatan Daerah		80.000.000.000,00		
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	4	55.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	4	75.000.000,00		
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	3	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	3	75.000.000,00		
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	4	110.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	4	100.000.000,00		
1.02.01.2.03	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah				Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah			100.000.000,00		
1.02.01.2.03.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				100.000.000,00		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			704.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.125.000.000,00		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	110.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	100.000.000,00		
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	110.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	1 paket	500.000.000,00		
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	1 paket	82.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	1 paket	100.000.000,00		
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	16.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya Laboratorium Kesehatan Daerah	1 paket	25.000.000,00		
1.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah dokumen Laporan hasil Konsultasi dan Berdiskusi	Dinas Kesehatan	2	385.000.000,00	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah dokumen Laporan hasil Konsultasi dan Berdiskusi	Dinas Kesehatan	2	400.000.000,00		
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			242.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.225.000.000,00		

1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah SAKIT beserta Prasarana dan Pendukungnya	- Jumlah RS beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang dibangun (paket)	1	33.000.000.000,00	Pembangunan Rumah Sakit beserta Prasarana dan Pendukungnya	Jumlah RS beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang dibangun (paket)	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1	33.000.000.000,00
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan sesuai standar nasional (paket)	2	20.113.519.305,00	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan sesuai standar nasional (paket)	Puskesmas beserta jaringannya	4	20.113.519.305,00
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (paket)	4	6.548.576.595,00	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	4	6.548.576.595,00
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun (unit)	3	1.965.271.660,00	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun (unit)	Puskesmas beserta jaringannya	12	1.965.271.660,00
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	- Jumlah Pengembangan Puskesmas	1	363.000.000,00	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas	Puskesmas beserta jaringannya	1	363.000.000,00
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (paket)	1	110.000.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1	110.000.000,00
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	12	11.002.802.027,80	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	12	11.002.802.027,80
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	56	29.667.893.799,50	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	56	29.667.893.799,50
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungkat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungkat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (paket)	8	329.010.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemungkat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemungkat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	8	329.010.000,00
1 02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Alat Kesehatan	- Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan evaluasi penggunaan Obat Rasional	1	3.555.577.991,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan evaluasi penggunaan Obat Rasional	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1	3.555.577.991,00
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	- Jumlah ketersediaan obat dan vaksin esensial	1	5.961.057.111,90	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah ketersediaan obat dan vaksin esensial	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1	5.961.057.111,90
1 02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah pelaksanaan monitoring di fasilitas pelayanan kesehatan tentang ketersediaan dan penggunaan obat dan vaksin esensial	27	3.042.394.085,50	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pelaksanaan monitoring di fasilitas pelayanan kesehatan tentang ketersediaan dan penggunaan obat dan vaksin esensial	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	27	3.042.394.085,50
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang dilakukan evaluasi penggunaan Obat Rasional	2850	70.872.487.165,80	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang dilakukan evaluasi penggunaan Obat Rasional	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2.750	70.872.487.165,80

1.02.02.202.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10256	508.497.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB - Case Notification Rate TBC - Angka kesembuhan ETA+ - Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC - Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC - Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes - Cakupan pendidik yang memiliki jenjang pendidikan kesehatan orng dengan gangguan jiwa berat - Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi - Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif - Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut - Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olah raga - Cakupan pelayanan kesehatan krisis dan bencana - Angka bebas jentik >95% - Persebaran Puskesmas dengan MF rate < 1 sebesar 100% - Persentase anak usia 2-12 tahun mendapatkan POPM kecacingan 75% - Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan faces pada ibu hamil pada trimester ke dua 100% - Persentase Sekolah Dasar yang dilakukan survey transtemi flurasis sesuai hasil perhitungan 100% - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana kasus pneumonia seksual standar - Persentase Puskesmas yang memiliki mesin fogging - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana GHPR sesuai standar 100% - Persentase Puskesmas API < 1 per 1000 penduduk sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana dare sesuai standar sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko sebesar 100% - Persentase Kecamatan dengan eradikasi frambusia 100% - Cakupan FKTP yang melakukan pelayanan Kesehatan rujukan sesuai standar - Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas - Persentase kunjungan pemeriksaan laboratorium - Cakupan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K4) - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan penanganun komplikasi pada kehamilan - Jumlah pelaksanaan Pengujian Audit Kematan Maternal-Perinatal Tingkat Kabupaten - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang Pelayanan 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	10.260	508.497.000,00	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB - Case Notification Rate TBC - Angka kesembuhan ETA+ - Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC - Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC - Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes - Cakupan pendidik yang memiliki jenjang pendidikan kesehatan orng dengan gangguan jiwa berat - Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi - Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif - Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut - Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olah raga - Cakupan pelayanan kesehatan kritis dan bencana - Angka bebas jentik >95% - Persebaran Puskesmas dengan MF rate < 1 sebesar 100% - Persentase anak usia 2-12 tahun mendapatkan POPM kecacingan 75% - Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan faces pada ibu hamil pada trimester ke dua 100% - Persentase Sekolah Dasar yang dilakukan survey transtemi flurasis sesuai hasil perhitungan 100% - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana kasus pneumonia seksual standar - Persentase Puskesmas yang memiliki mesin fogging - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana GHPR sesuai standar 100% - Persentase Puskesmas API < 1 per 1000 penduduk sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana dare sesuai standar sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko sebesar 100% - Persentase Kecamatan dengan eradikasi frambusia 100% - Cakupan FKTP yang melakukan pelayanan Kesehatan rujukan sesuai standar - Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas - Persentase kunjungan pemeriksaan laboratorium - Cakupan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K4) - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan penanganun komplikasi pada kehamilan - Jumlah pelaksanaan Pengujian Audit Kematan Maternal-Perinatal Tingkat Kabupaten - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang Pelayanan 	10.260	508.497.000,00	10.260	4	24
----------------	---	-------	----------------	---	---	---	--------	----------------	---	---	--------	----------------	--------	---	----

1 02 02 202 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10256	3.841.016.300,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.260	3.841.016.300,00	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil - Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan penanganann kompilasi pada persalinan - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah ibu bersalin miskin yang mendapatkan pertolongan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan - Jumlah ibu hamil/ bersalin/ neonatus miskin yang mendapatkan pelayanan penanganann kompilasi - Jumlah Rumah Tunngu Kelahiran (RTK) yang tersedia di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotajaya - Jumlah nakes yang mendapatkan pelatihan seluhan persalinan normal (APN) - Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang melaksanakan PONEB 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	10.260	3.841.016.300,00
1 02 02 202 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8809	500.478.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.900	500.478.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN3) - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan penanganann kompilasi - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDITK) - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan Balita 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	8.900	500.478.000,00
1 02 02 202 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	45756	233.013.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	45.800	233.013.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia sekolah yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah Pelayanan deteksi dini kanker di Puskesmas - Jumlah Pelayanan deteksi dini gangguan indera di Puskesmas - Penyediaan media KIE/ Buku Faktor Risiko PTM - Jumlah Kegiatan Money PTM ke Puskesmas - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan skrining kesehatan pada jumlah kegiatan Peningkatan SDM pelaksanaan program PTM / Intra. - Jumlah Sekolah yang melaksanakan implementasi KTR - Jumlah kegiatan edukasi dan penyuluhan ke sasaran program 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	45.800	233.013.000,00
1 02 02 202 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	193	253.952.613,20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	220	253.952.613,20	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia sekolah yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah Pelayanan deteksi dini kanker di Puskesmas - Jumlah Pelayanan deteksi dini gangguan indera di Puskesmas - Penyediaan media KIE/ Buku Faktor Risiko PTM - Jumlah Kegiatan Money PTM ke Puskesmas - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan skrining kesehatan pada jumlah kegiatan Peningkatan SDM pelaksanaan program PTM / Intra. - Jumlah Sekolah yang melaksanakan implementasi KTR - Jumlah kegiatan edukasi dan penyuluhan ke sasaran program 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	220	253.952.613,20
1 02 02 202 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.750	2.841.052.633,80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24	2.841.052.633,80	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah usia lanjut yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Puskesmas beserta jaringannya - Tersedianya alat skrining / pemeriksaan penderita Hipertensi - Jumlah Pengembangan dan peningkatan SDM PANDU PTM - Jumlah pengembangan dan penguatan surveilans dan SIPTM - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Protabis penderita Hipertensi 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24	2.841.052.633,80
1 02 02 202 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8730	420.795.113,20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.800	420.795.113,20	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah usia lanjut yang diberikan layanan sesuai standar - Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Puskesmas beserta jaringannya - Tersedianya alat skrining / pemeriksaan penderita Hipertensi - Jumlah Pengembangan dan peningkatan SDM PANDU PTM - Jumlah pengembangan dan penguatan surveilans dan SIPTM - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Protabis penderita Hipertensi 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	8.800	420.795.113,20
1 02 02 202 08	Penderita Hipertensi	2	629.100.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3	629.100.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Puskesmas beserta jaringannya - Tersedianya alat skrining / pemeriksaan penderita Hipertensi - Jumlah Pengembangan dan peningkatan SDM PANDU PTM - Jumlah pengembangan dan penguatan surveilans dan SIPTM - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Protabis penderita Hipertensi 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	3	629.100.000,00
1 02 02 202 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1	565.905.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	24	565.905.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelayanan terpadu (PANDU) PTM Puskesmas - Jumlah kampanye pengendalian gula darah dan lemak Tingkat Puskesmas - Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Diabetes mellitus 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24	565.905.000,00

1. 02 2.02 10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24 unit	1.736.656.000,00	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	48 paket	1.736.656.000,00
1. 02 2.02 11	Pelayanan Kesehatan Orang Terkena Tuberkulosis	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	4600	357.390.000,00	Pelayanan Kesehatan Orang Terkena Tuberkulosis	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	4.860	357.390.000,00
1. 02 2.02 12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	11700	384.285.000,00	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	11.700	384.285.000,00
1. 02 2.02 14	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	65	78.441.000,00	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	65	78.441.000,00
1. 02 2.02 15	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	60	2.498.593.316,00	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	62	2.498.593.316,00
1. 02 2.02 16	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	30		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	31	
1. 02 2.02 17	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	37770		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	38.903	
1. 02 2.02 18	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	114		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	120	
1. 02 2.02 19	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	15834		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	17.417	
1. 02 2.02 20	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	221		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	225	
1. 02 2.02 21	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	9653		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	10.136	
1. 02 2.02 22	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	770		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	780	
1. 02 2.02 23	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	7		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	9	
1. 02 2.02 24	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	3838		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	3.953	
1. 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	2096		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	2.201	
1. 02 2.02 26	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	60		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	62	
1. 02 2.02 27	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	721		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	725	
1. 02 2.02 28	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	48		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	72	
1. 02 2.02 29	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	877		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	887	
1. 02 2.02 30	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	72		Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	75	

1 02 202 26	Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	14.000	3	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan Faeces pada trimester ke dua Jumlah bayi balita batuk /kesukiran bernafas yang di ukur TDDK Jumlah Puskesmas yang melaporkan orang dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah endemis malaria Jumlah Puskesmas yang mengikuti kegiatan Rortorintasi Eliminasi Malaria Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar Jumlah Puskesmas melakukan survey berkak dan survey kontak kusta Jumlah Puskesmas melakukan pemeriksaan frambusia Jumlah SD/MI yang dilakukan survey transmisi filariasis (TAS) Jumlah Puskesmas yang mempunyai Mesin Fogging Jumlah Dosis VAR yang disediakan Jumlah Dosis SAR yang disediakan Jumlah Fasyankes mengikuti Pertemuan tata laksana kasus Jumlah kegiatan survey resistensi Insektisida/Arvasida Jumlah Mikroskopis Malaria Puskemas yang mengikuti refrening/pelatihan mikroskopis Jumlah peserta lintas sektor yang mengikuti pertemuan eliminasi malaria Jumlah Kegiatan Pelatihan Eliminasi Malaria Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Vektor Jumlah Rapid HBSG yang tersedia Jumlah Vaksin HBIG yang tersedia Jumlah pendidik/misik yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan PHI daerah Jumlah peserta BPS kelas III mandiri yang mendapatkan subsidi APBD 	55.217	24	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Puskesmas yang melakukan pemeriksaan Faeces pada trimester ke dua Jumlah bayi balita batuk /kesukiran bernafas yang di ukur TDDK Jumlah Puskesmas yang melaporkan orang dengan riwayat perjalanan dari dan ke daerah endemis malaria Jumlah Puskesmas yang mengikuti kegiatan Rortorintasi Eliminasi Malaria Jumlah Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar Jumlah Puskesmas melakukan survey berkak dan survey kontak kusta Jumlah Puskesmas melakukan pemeriksaan frambusia Jumlah SD/MI yang dilakukan survey transmisi filariasis (TAS) Jumlah Puskesmas yang mempunyai Mesin Fogging Jumlah Dosis VAR yang disediakan Jumlah Dosis SAR yang disediakan Jumlah Fasyankes mengikuti Pertemuan tata laksana kasus Jumlah kegiatan survey resistensi Insektisida/Arvasida Jumlah Mikroskopis Malaria Puskemas yang mengikuti refrening/pelatihan mikroskopis Jumlah peserta lintas sektor yang mengikuti pertemuan eliminasi malaria Jumlah Kegiatan Pelatihan Eliminasi Malaria Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Vektor Jumlah Rapid HBSG yang tersedia Jumlah Vaksin HBIG yang tersedia Jumlah pendidik/misik yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan PHI daerah Jumlah peserta BPS kelas III mandiri yang mendapatkan subsidi APBD 	9.847.828.142,00	9.847.828.142,00
1 02 202 30	Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	22.000	1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan dan rekomendasi hasil penelitian Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan layanan sesuai standar Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Penilaian Akreditasi Jumlah Tim PSC 119 Kabupaten yang terbentuk Jumlah Tim PSC mendapatkan Pelatihan Penguasaan Jumlah fasilitas Kesehatan rujukan terintegrasi dengan NCC 119 dan PSC 	26.000	9	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00
1 02 202 31	Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	109.999.829,50	1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan layanan sesuai standar Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Penilaian Akreditasi Jumlah Tim PSC 119 Kabupaten yang terbentuk Jumlah Tim PSC mendapatkan Pelatihan Penguasaan Jumlah fasilitas Kesehatan rujukan terintegrasi dengan NCC 119 dan PSC 	109.999.829,50	1	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	109.999.829,50	109.999.829,50
1 02 202 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	929.298.899,10	1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Penilaian Akreditasi Jumlah Tim PSC 119 Kabupaten yang terbentuk Jumlah Tim PSC mendapatkan Pelatihan Penguasaan Jumlah fasilitas Kesehatan rujukan terintegrasi dengan NCC 119 dan PSC 	929.298.899,10	1	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	929.298.899,10	929.298.899,10
1 02 202 35	Pelembagaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	2.950.414.500,00	8	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Tim PSC 119 Kabupaten yang terbentuk Jumlah Tim PSC mendapatkan Pelatihan Penguasaan Jumlah fasilitas Kesehatan rujukan terintegrasi dengan NCC 119 dan PSC 	2.950.414.500,00	10	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	2.950.414.500,00	2.950.414.500,00
1 02 202 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	2.250.000.000,00	1	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Puskesmas yang memiliki terintegrasi Jumlah petugas yang melaksanakan SIK Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SIK Daerah Jumlah Petugas SIK di Dinas dan Puskesmas yang sudah dilatih Jumlah Alat/Perangkat SIK dan Jaringan internet yang di adakan (linker) 	2.250.000.000,00	1	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
1 02 202 203	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	623.268.712,50	1	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SIK Jumlah Petugas SIK di Dinas dan Puskesmas yang sudah dilatih Jumlah Alat/Perangkat SIK dan Jaringan internet yang di adakan (linker) 	623.268.712,50	1	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	623.268.712,50	623.268.712,50
1 02 202 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	204.000.000,00	24	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SIK Jumlah Petugas SIK di Dinas dan Puskesmas yang sudah dilatih Jumlah Alat/Perangkat SIK dan Jaringan internet yang di adakan (linker) 	204.000.000,00	24	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	204.000.000,00	204.000.000,00
1 02 202 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	309.269.614,50	8	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SIK Jumlah Petugas SIK di Dinas dan Puskesmas yang sudah dilatih Jumlah Alat/Perangkat SIK dan Jaringan internet yang di adakan (linker) 	309.269.614,50	8	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	309.269.614,50	309.269.614,50
1 02 202 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	109.999.098,00	5	<ul style="list-style-type: none"> Persentase FKTL melakukan pelayanan sesuai standar Jumlah RS Kelas C dan D dengan pelayanan sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Bujukan yang dilakukan Pengawasan dan Memiliki link occasional 	109.999.098,00	5	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	109.999.098,00	109.999.098,00
1 02 202 04	Persentase FKTL melakukan pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	677.500.000,00	3	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah RS Kelas C dan D dengan pelayanan sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Bujukan yang dilakukan Pengawasan dan Memiliki link occasional 	677.500.000,00	3	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	677.500.000,00	677.500.000,00
1 02 204 01	Pengendalian dan Pengawasan pelayanan sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	100.000.000,00	2	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah RS Kelas C dan D dengan pelayanan sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Bujukan yang dilakukan Pengawasan dan Memiliki link occasional 	100.000.000,00	2	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	100.000.000,00	100.000.000,00
1 02 204 01	Pengendalian dan Pengawasan pelayanan sesuai Standar	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	100.000.000,00	3	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah RS Kelas C dan D dengan pelayanan sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Bujukan yang dilakukan Pengawasan dan Memiliki link occasional 	100.000.000,00	3	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	100.000.000,00	100.000.000,00

1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MACAMAN MINUMAN	JUMLAH PERMILIHAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	519.789.600,00					519.789.600,00		
1 02 04 2.01	Pembelian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah validasi perizinan sarana pelayanan kefarmasian	149.901.400,00					149.901.400,00		
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian	101.200.000,00	50				101.200.000,00	55	
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengaliran Data Perizinan dan Tindakan Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang dilakukannya validasi perizinan sarana pelayanan kefarmasian	22.493.900,00	54				22.493.900,00	54	
1 02 04 2.01 03	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah fasilitas perizinan sarana pelayanan kefarmasian	26.207.500,00	10				26.207.500,00	10	
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbehalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Persusahaan Rumah Tangga	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi kelas dan PKRT								
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Bawara yang memiliki sertifikat produksi kelas dan PKRT								
1 02 04 2.02 03	Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang mendapatkan sertifikat layak produksi	213.779.500,00					213.779.500,00		
1 02 04 2.02 03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyelubuhan Keamanan Pangan (PKP)	213.779.500,00	120				213.779.500,00	120	
1 02 04 2.02 03 02	Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang mendapatkan pengawasan dalam rangka pemberian SPP-IRT	156.108.700,00	68				156.108.700,00	68	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat								
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post-Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan pengawasan	156.108.700,00	80				156.108.700,00	80	
1 02 04 2.06 01 01	Jumlah sampling dan pengujian Pangan Industri Rumah Tangga Pangan			14					14	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19	400.542.400,00	50				400.542.400,00	55	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitran, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat	150.542.400,00	30				150.542.400,00	32	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Ujaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitran dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19	150.542.400,00					150.542.400,00		

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat Kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan, Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan kesehatan sepanjang anggaran mampu mengakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang Kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, seperti tersaji dalam Tabel 2.6. (T-C.32) di bawah ini.

Tabel 2.6 (T-C.32)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Ketapang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Dusun	Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rasio RS per 100.000 penduduk, Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk, Persentase prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan lainnya		
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (paket)		
	1 Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Banda Sari	Wanaraharja RT 06	Banda Sari	Air Upas		1 Paket	MUSRENDESKEL 61.04.21.2006
	2 Relokasi Pustu Desa Sepotong Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang	Sepotong	Sepotong	Sungai Laur		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.07.2004
	3 Pembangunan Gedung Polindes	Dusun 1	Suka Harapan titik koordinat : -2.1842902S 110.3521215E	Kendawangan		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.04.2007
	4 Pembangunan Pustu	Pangkalan Batu	Desa Pangkalan Batu (titik koordinat : 2.1348012 110.2047778E)	Kendawangan		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.04.2004
	5 Pembangunan Pustu Kucai	Kucai	Labai Hilir	Simpang Hulu		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.08.2017
	6 Pembangunan Poskesdes	Kuala Labai	Labai Hilir	Simpang Hulu		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.08.2017
	7 Pembangunan Pustu	Bangkal Serai	Bangkal Serai titik koordinat: 2.271582S 110.3628296E	Kendawangan		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.04.2005
	8 Pembangunan Pustu	Kenanga	Kenanga	Simpang Hulu		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.08.2014
	9 Pembangunan Pustu	Batu Benteng	Pateh Benteng	Nanga Tayap		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.11.2018
	10 Pembangunan Gedung Polindes Dusun Sengkuang	Sengkuang RT 09	Harapan Baru	Air-Upas		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.22.2005
	11 Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Makmur Sari RT 012	Suka Sari	Singkup		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.22.2007
	12 Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Sumpai RT 01 RW 02	Tanah Hitam	Singkup		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.22.2007

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Dusun	Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	2	3	4	5	6	7	8
	13 Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Pantai Ketikal RT 002 RW 001	Pantai Ketikal	Singkup		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.22.2008
	14 Pembangunan Puskesmas Pembantu	Kemuning Hulu	Kemuning	Manismata		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.03.2007
	15 Pembangunan Pustu (Uk. 12 X 8 M)	Wonorejo RT 007 RW 004	Sukamulya	Singkup		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.25.2003
	16 Pembangunan Gedung Baru Poskesdes	Benatu	Limpang Jaya	Jelai Hulu		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.14.2008
	17 Pembangunan Gedung Posyandu Dusun Banjar	Banjur	Mekar Jaya	Simpang Dua		1 paket	
	18 Pembangunan Pustu Desa Suka Mulya	Wonorejo RT 007 RW 004	Suka Mulya	Sungai Melayu Rayak		1 unit	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun (unit)		
	1 Rumah Dinas Tenaga Medis	Cinta Manis	Cinta Manis	Hulu Sungai		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.19.2003
	2 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sido Makmur	Sukamulya	Singkup		2 unit	MUSRENDESKEL 61.04.22.2001
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (paket)		
	1 Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan	Mekar Sari	Bukit Kelambing	Singkup		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.22.2003
	2 Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan	Rantau Panjang RT 08 RW 08	Sukaharja	Singkup		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.22.2006
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)		
	1 Solar Sel dan Cold Chain Penyimpanan Vaksin	Congkong Baru	Krio Hulu	Hulu Sungai		1 paket	MUSRENDESKEL 61.04.19.2009
	2 Pengadaan Ambulans Desa	Sindur RT 001	Mekar Sari	Benua Kayong		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.18.2010
	3 Dumtruck	Teratai	Titi Baru	Tumbang Titi		1 unit	MUSRENDESKEL 61.04.13.2027
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)		
	1 Pagar Poskesdes	Kusik Bulin RT 02 RW 01	Kusik Batu Lapu	Riam		100 meter	MUSRENDESKEL 61.04.14.2018
	2 Pembangunan Gedung Posyandu	Gajah Hilir	Mekar Jaya	Manismata		1 paket	MUSRENDESKEL 61.04.20.2003
	3 Pembangunan Sumur Bor dan Tandon Air Dusun Tam - Tam Desa Air Durian Jaya	Tam - Tam	Air Durian Jaya	Air Upas		1 paket	MUSRENDESKEL 61.04.21.2003
	4 Pembangunan Sumur Bor dan Tandon Air Dusun Ayau - Ayau Desa Air Durian Jaya	Ayau - Ayau	Air Durian Jaya	Air Upas		1 paket	MUSRENDESKEL 61.04.21.2003

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Dusun	Desa/Kelurahan	Kecamatan			
1	<p>2</p> <p>5 Pembangunan Sumur Bor Lima (5) Unit di Empat (4) titik; RT 001; RT 002; RT 003 ; RT 004</p> <p>6 Pembangunan Pagar Poskesdes</p> <p>7 Pembangunan Pagar Pustu Desa Tanggerang</p> <p>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>1 Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes Desa Sari Bekayas</p> <p>2 Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes</p> <p>3 Pengadaan Peralatan Kesehatan Poskesdes</p> <p>Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>1 Rehap Lantai Poskesdes</p> <p>2 Rehab Berat Puskesmas Pembantu Botong</p> <p>3 Rehab Bangunan Rumah Dinas Milik Puskesmas Kuala Kuala Tolak 1 Buah Desa Kuala Tolak</p> <p>4 Rehab Berat Pustu Dusun Tunas Kampar</p> <p>5 Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Banda Sari</p> <p>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</p> <p>1 Penyediaan Tenaga Medis</p>	<p>3</p> <p>Suka Ramai</p> <p>Sungai Potong</p> <p>Tanjung III RT 04 RW 02</p> <p>Sejambuan RT 02</p> <p>Sebaik</p> <p>Laman Baru</p> <p>Sinar Nibung</p> <p>Botong Kiri</p> <p>Tegas</p> <p>Tunas Kampar</p> <p>Wanaraharja</p> <p>Sekembar</p>	<p>4</p> <p>Suka Ramai</p> <p>Merimbang Jaya</p> <p>Tanggerang</p> <p>Sari Bekayas</p> <p>Kerta Baru</p> <p>Usaha Baru</p> <p>Riam Dadap</p> <p>Kualan Hulu</p> <p>Kuala Tolak</p> <p>Kampar Sebomban</p> <p>Banda Sari</p> <p>Kayung Tuhe</p>	<p>5</p> <p>Manismata</p> <p>Sandai</p> <p>Jelai Hulu</p> <p>Air Upas</p> <p>Pemahan</p> <p>Pemahan</p> <p>Hulu Sungai</p> <p>Simpang Hulu</p> <p>Kuala Satong</p> <p>Simpang Dua</p> <p>Air Upas</p> <p>Nanga Tayap</p>	<p>6</p> <p>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (paket)</p> <p>Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>JUMLAH DOKUMEN DAN / REGULASI YANG DITERBITKAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN</p> <p>Persentase Faskes yang memiliki Tenaga Kesehatan sesuai Standar</p> <p>Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar</p>	<p>7</p> <p>5 unit</p> <p>891 m2</p> <p>250 meter</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Set</p> <p>1 Paket</p> <p>2 unit</p> <p>1 paket</p> <p>1 buah</p> <p>1 paket</p> <p>1 unit</p> <p>1 orang</p>	<p>8</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.03.2003</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.05.2014</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.14.2002</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.21.2002</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.24.2006</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.24.2005</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.19.2006</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.08.2003</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.01.2013</p> <p>MUSRENDESKEL 61.04.11.2020</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Visi Kementerian Kesehatan mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada tiga pilar pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter.

Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Dimana Kementerian Kesehatan melaksanakan misi yang ke satu yakni “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” dan misi kedua yakni “Penguatan Struktur Ekonomi

yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing". Secara rinci Misi Presiden terkait kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*)

Merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar,

pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Kementerian Kesehatan menetapkan delapan Sasaran Strategis dalam rangka mencapai lima Tujuan Strategis. Matrik Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan seperti pada table 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	2	3
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	- Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	- Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	- Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan - Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar - Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih - Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Dalam rangka perumusan kebijakan kesehatan, setiap tahunnya Kementerian Kesehatan melakukan rapat kerja tahunan atau Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Pada Rakerkesnas Tahun 2020 dibahas 5 (lima) fokus masalah kesehatan diantaranya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), pengendalian *Stunting*, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Germas, dan Tata Kelola Sistem Kesehatan. Dimana 5 (lima) masalah kesehatan tersebut di arahkan pada konteks pendekatan promotif dan preventif. Selain dari itu, dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), arah kebijakan bidang kesehatan mulai dari tingkat Pusat hingga ke daerah difokuskan kepada pemulihan dampak kesehatan dari pandemi Covid-19.

Untuk Sinergisitas Perencanaan antara Pusat dan Daerah, Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Kabupaten Ketapang mempedomani Renstra yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Selain dari itu Dinas Kesehatan juga mengikuti strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang yang menekankan pada perubahan (*transformasi*) dan percepatan (*akselerasi*) dengan prioritas pada misi ke-3 yaitu **“Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing”**.

B. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan target kualitatif, sehingga pencapaian terget merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya

merupakan *benefits* atau *impacts* dari suatu kegiatan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang adalah **“meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**, dengan indikator tujuan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari kondisi awal 71.10 menjadi 71.56 tahun di masa akhir yakni tahun 2026.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional/dapat dicapai berdasarkan kemampuan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki, berorientasi hasil dan dapat dicapai pada periode waktu tertentu.

Penentuan sasaran Dinas Kesehatan untuk Rencana Kerja tahun 2022 mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 yang dipadukan dengan kondisi saat ini. Sasaran Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun periode 2016 – 2021 disertai dengan indikator kerja sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dan dijadikan tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi Bupati Ketapang. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menetapkan sasaran yakni:

- a. meningkatnya kualitas kesehatan ibu
- b. meningkatnya kualitas kesehatan bayi
- c. meningkatnya kualitas kesehatan balita
- d. menurunnya *prevalensi stunting*
- e. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- f. menurunnya kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
- g. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Secara rinci rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	230
		Meningkatnya kualitas kesehatan bayi	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	18
		Meningkatnya kualitas kesehatan balita	Angka kematian balita (per 1000 balita)	18,5
		Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting pada balita	18,4
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<i>Insidence Rate</i> kasus DBD	49
			<i>Prevalensi</i> hipertensi	21
		Menurunnya kasus Covid-19	Zonasi pemetaan kasus Covid-19	Kuning
		Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	90%

C. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, penentuan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2021-2026 memiliki program prioritas yang tertuang didalam lima panca karya. Dimana Panca Karya tersebut difokuskan pada upaya pencapaian: a) Ketapang Sehat, b) Ketapang Cerdas, c) Ketapang Nyaman, d) Ketapang Peduli dan e) Ketapang Sejahtera.

Sesuai dengan tugasnya yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, Dinas kesehatan melaksanakan panca karya “Ketapang Sehat”, yang merupakan panca karya yang pertama. Terdapat lima fokus penting dalam rangka implementasi panca karya Ketapang Sehat diantaranya:

1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya);
2. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular;
3. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya;

4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan;
5. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang.

Dalam upaya pelaksanaan Panca Karya Ketapang sehat sehingga dapat dimunculkan kerangka pembiayaan, Fokus kegiatan tersebut perlu dilakukan *mapping* kedalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 seperti table 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3 Hasil mapping fokus kegiatan terhadap Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

No	Fokus	Program dalam Kepmendagri 050-3708
1	2	3
1	Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya)	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penyakit menular dan penyakit tidak menular	- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan termasuk obat, vaksin, dan alat penunjang medis lainnya	- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
4	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang kesehatan	- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
5	Pemerataan penempatan tenaga kesehatan diseluruh wilayah kabupaten ketapang	- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan

Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang merupakan program prioritas yang termuat didalam RPJMD Kabupaten Ketapang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 terbagi dalam dua jenis, yaitu Program Penunjang dan Program Urusan Bidang Kesehatan. Secara Rinci sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Sediaan Farmasu, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

- 3) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 4) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program dan Kegiatan Penunjang
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Peningkatan Pelayanan BLUD

Secara rinci rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang seperti pada tabel 3.4 (T-C.33) di bawah ini:

Tabel 3.4 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Ketapang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	URUSAN WAJIB KESEHATAN								
1.02.01	DINAS KESEHATAN				327.572.065.770,00	APBD (DAU)			391.924.313.549,42
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu			108.480.994.100,20				145.591.204.229,48
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			495.000.000,00				544.500.000,00
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	8	220.000.000,00	APBD (DAU)		8	242.000.000,00
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	6	275.000.000,00	APBD (DAU)		6	302.500.000,00
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80.834.189.996,20				113.101.865.994,68
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah		80.614.189.996,20	APBD (DAU)			112.859.865.994,68
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Seluruh ASN	4	55.000.000,00	APBD (DAU)		4	60.500.000,00
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	3	55.000.000,00	APBD (DAU)		3	60.500.000,00
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	4	110.000.000,00	APBD (DAU)		4	121.000.000,00

Kode	Usuran / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
										4	5	6
1	2	3										
1 02 01 2.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	12 bulan	825.000.000,00	APBD (DAU)			907.500.000,00			
1 02 01 2.08 04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Penyediaan Gaji Tenaga Administrasi dan Cleaning Service	Dinas Kesehatan	12 bulan	2.545.919.200,00	APBD (DAU)			2.800.511.120,00			
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.012.252.000,00				2.213.477.200,00			
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	- Jumlah kendaraan dinas perorangan dan jabatan yang dilakukan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak untuk kurun waktu 1 tahun	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah		110.000.000,00	APBD (DAU)			121.000.000,00			
1 02 01 2.09 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dilakukan jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak untuk kurun waktu 1 tahun	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah		88.000.000,00	APBD (DAU)			96.800.000,00			
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	- Jumlah Peralatan dan Mesin	Dinas Kesehatan		88.000.000,00	APBD (DAU)			96.800.000,00			
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung / kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan rehabilitasi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2	1.616.252.000,00	APBD (DAU)			1.777.877.200,00			
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung / kantor yang dilakukan rehabilitasi	Dinas Kesehatan	2	55.000.000,00	APBD (DAU)			60.500.000,00			
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung / kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan rehabilitasi	Dinas Kesehatan		55.000.000,00	APBD (DAU)			60.500.000,00			
1 02 01 2,10	Peningkatan Pelayanan BLUD	- Jumlah Pelayanan BLUD			20.778.537.204,00				24.934.244.644,80			

Kode	Ususan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BLUD	Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	24	20.778.537.204,00	APBD (DAU)	24	24.934.244.644,80	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				219.091.071.669,80			246.333.109.319,94	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				187.832.358.454,00			206.615.594.299,40	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Rasio RS per 100.000 penduduk - Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk - Persentase prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan lainnya			115.659.102.575,70			127.225.012.833,27	
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Jumlah RS beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang dibangun (paket)	Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1	33.000.000.000,00	APBD (DAU)	1	36.300.000.000,00	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembangunan sesuai standar nasional (paket)	Puskesmas beserta jaringannya	4	20.113.519.305,00	APBD (DAU)	4	22.124.871.235,50	
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	4	6.548.576.595,00	APBD (DAU)	4	7.203.434.254,50	
1 02 02 2.01 04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	- Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun (unit)	Puskesmas beserta jaringannya	12	1.965.271.660,00	APBD (DAU)	12	2.161.798.826,00	
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	- Pengembangan Puskesmas				APBD (DAU)		-	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	- Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (paket)	Puskesmas beserta jaringannya	1	363.000.000,00	APBD (DAU)	1	399.300.000,00	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi	1	110.000.000,00	APBD (DAU)	1	121.000.000,00	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas	12	11.002.802.027,80	APBD (DAU)	12	12.103.082.230,58	

Kode	Usuran / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3							
1 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (paket)	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas	56	29.667.893.799,50	APBD (DAU)		56	32.634.683.179,45
1 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	- Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melakukan kalibrasi alat kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas	8	329.010.000,00	APBD (DAU)		8	361.911.000,00
1 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	- Jumlah ketersediaan obat dan vaksin esensial - Jumlah pelaksanaan monitoring di fasilitas pelayanan kesehatan tentang ketersediaan dan penggunaan obat dan vaksin esensial - Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang dilakukan evaluasi penggunaan Obat Rasional - Jumlah ketersediaan obat penanganan Covid-19	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 27 24 1	3.555.577.991,00	APBD (DAU)		1 30 24 1	3.911.135.790,10
1 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	- Jumlah Ketersediaan Bahan Habis Pakai - Jumlah Ketersediaan Bahan Habis Pakai Penanganan COVID-19 - Jumlah pembelian BMHP TB (Catridge TCM) - Jumlah pembelian BMHP HIV (RDT HIV Sifilis) - Jumlah pembelian BMHP Larvasida Malaria	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1 1 2.750 11.300 146	5.961.057.111,90	APBD (DAU)		1 1 2.900 11.400 176	6.557.162.823,09
1 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas		3.042.394.085,50	APBD (DAU)			3.346.633.494,05
1 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 - Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita - Persentase Desa/Kelurahan UCI - Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi dan Tercapainya Imunisasi Lanjutan Pada bayi - Tercapainya Jumlah Kelahiran/ Desa yang dilakukan Sweeping Imunisasi - Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) Pada Balita			70.872.487.165,80				77.959.735.882,38

Kode	Usuan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3					8	9	10
		<ul style="list-style-type: none"> - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita - Cakupan Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beriodium - Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan - Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV - Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB - Case Notification Rate TBC - Angka kesembuhan BTA+ - Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC - Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC - Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes - Cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan - Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat - Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi - Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif - Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut - Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olah raga - Cakupan pelayanan kesehatan krisis dan bencana - Angka bebas jentik >95% - IR<49 per 100.000 penduduk - Persentase Puskesmas dengan MF rate < 1 sebesar 100% - Persentase anak usia 2-12 tahun mendapatkan POPM kecacingan 75% 							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan faeces pada ibu hamil pada trimester ke dua 100% - Persentase Sekolah Dasar yang dilakukan survey transmisi filariasis sesuai hasil perhitungan 100% - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana kasus pneumonia sesuai standar - Persentase puskesmas yang memiliki mesin fogging - Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana GHPR sesuai standar 100% - Persentase Puskesmas API < 1 per 1000 penduduk sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar sebesar 100% - Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko sebesar 100% - Persentase Kecamatan dengan eradikasi frambusia 100% - Cakupan FKTP yang melakukan pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai standar - Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas - Persentase kunjungan pemeriksaan laboratorium - Cakupan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K4) - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan penanganan komplikasi pada kehamilan - Jumlah pelaksanaan Pengkajian Audit Kematian Maternal-Perinatal Tingkat Kabupaten - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang Pelayanan 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	10.260	508.497.000,00	APBD (DAU)		10.270	559.346.700,00
				10.260				10.270	
				4				4	
				24				24	

Kode	Usuan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
								5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil - Jumlah ibu hamil yang terjaring (KI) - Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan penanganan komplikasi pada persalinan - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan - Jumlah ibu bersalin miskin yang mendapatkan pertolongan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan - Jumlah ibu hamil/ bersalin/neonatus miskin yang mendapatkan pelayanan penanganan komplikasi - Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang tersedia di wilayah Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Ketapang - Jumlah nakes yang mendapatkan pelatihan asuhan persalinan normal (APN) - Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang melaksanakan PONED 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	10.260 10.260 9.800 24 1.050 1.050 25 24 24	3.841.016.300,00	APBD (DAU)		10.270 10.270 9.850 24 1.065 1.065 25 24 24	4.225.117.930,00
1 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (KN3) - Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan penanganan komplikasi - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	8.900 8.900 8.900	500.478.000,00	APBD (DAU)		8.950 8.950 8.950	550.525.800,00
1 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang pelayanan kesehatan Balita 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	45.800 24 24	233.013.000,00	APBD (DAU)		45.850 24 24	256.314.300,00
1 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia sekolah yang diberikan layanan sesuai standar 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya		253.952.613,20	APBD (DAU)			279.347.874,52
1 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelayanan Posbindu 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	220 desa	2.841.052.633,80	APBD (DAU)		220 desa	3.125.157.897,18

Kode	Unsur / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pada Usia Produktif	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelayanan deteksi dini kanker di Puskesmas - Jumlah Pelayanan deteksi dini gangguan indera di Puskesmas - Penyediaan media KIE/ Buku Faktor Resiko PTM - Jumlah Kegiatan Money PTM ke Puskesmas - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan skrining kesehatan pada pelayanan posbindu dan skrining kanker - Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pelaksanaan program PTM (indra, kanker, KTR) - Jumlah Sekolah yang melaksanakan implementasi KTR - Jumlah kegiatan edukasi dan penyuluhan ke sasaran program 	Puskesmas beserta jaringannya	24 24 48 paket 24 24 alat dan 24 paket BMHP 2 50 50				24 24 48 paket 24 24 alat dan 24 paket BMHP 2 100 50	
1 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah usia lanjut yang diberikan layanan sesuai standar 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	8.900	420.795.113,20	APBD (DAU)		8.900	462.874.624,52
1 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Hipertensi - Tersedianya alat skrining / pemeriksaan penderita Hipertensi - Jumlah Pengembangan dan peningkatan SDM PANDU PTM - Jumlah pengembangan dan penguatan surveilans dan SIPTM - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan prolansis penderita Hipertensi 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	3 4 unit 48 24 24	629.100.000,00	APBD (DAU)		4 6 unit 24	692.010.000,00
1 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelayanan terpadu (PANDU) PTM Puskesmas - Jumlah Kampanye pengendalian gula garam dan lemak Tingkat Puskesmas - Jumlah kegiatan Penemuan Kasus Diabetes melitus - Tersedianya alat dan BMHP pemeriksaan penderita diabetes melitus sesuai standar - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan prolansis penderita Diabetes melitus 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24 24 3 48 paket 24	565.905.000,00	APBD (DAU)		24 24 4 24 paket 24	622.495.500,00

Kode	Ususan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan ODG] berat - Jumlah kegiatan Advokasi dan sosialisasi TPKJM - Jumlah pasien ODG] berat yang di rujuk ke RSJ - Jumlah Puskesmas yang melayani rawat jiwa - Jumlah penyediaan media KIE - Jumlah kegiatan peningkatan SDM penanggulangan masalah kesehatan jiwa - Jumlah kegiatan pendampingan SPK] ke Puskesmas rawat jiwa 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24	1.736.656.000,00	APBD (DAU)	24	1.910.321.600,00	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar - Jumlah penemuan kasus TBC anak - Jumlah kasus TB yang ditemukan dan diobati - Jumlah Penderita TB yang mengetahui status HIV - Jumlah Pengobatan TB MDR - Jumlah penderita TB yang diobati dan sembuh - Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	4.860	357.390.000,00	APBD (DAU)	4.860	393.129.000,00	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV dites HIV - Jumlah orang yang dites dan mengetahui status HIV/AIDSnya - Jumlah ODHA yang mengetahui status HIV dan memulai pengobatan ARV - Jumlah Ibu Hamil yang di skrining HIV - Jumlah Penderita TB yang di tes HIV - Jumlah Wilayah Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang mendapat pelayanan kesehatan 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	11.700	384.285.000,00	APBD (DAU)	11.700	422.713.500,00	
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan untuk Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan - Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapatkan pemantauan kunjungan rumah 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	65	78.441.000,00	APBD (DAU)	75	86.285.100,00	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan - Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapatkan pemantauan kunjungan rumah 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	62	2.498.593.316,00	APBD (DAU)	63	2.748.452.647,60	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3						9	10
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sekolah yang menjadi sampel pengambilan garam beryodium - Jumlah Tenaga Puskesmas yang dilatih Tatalaksana Penanganan Gizi Buruk - Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) - Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih Konseling Menyusui 		173				175	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24	367.796.660,00	APBD (DAU)		24	404.576.326,00
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Desa Pemukiman STBM - Jumlah sarana air minum memenuhi syarat - Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) - Jumlah tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan - Jumlah tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan klinik sanitasi - Jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan - Distribusi bahan keperluan pasien covid-19, bahan desinfeksi penanggulangan covid-19 dan lokasi/tempat penyemprotan terkonfirmasi covid-19 - Jumlah calon jamaah haji yang melaksanakan senam kebugaran - Jumlah Sanitarian yang dilatih tentang STBM - Jumlah kader kesehatan lingkungan yang dilatih Pemukiman STBM - Jumlah Sanitarian yang dilatih TTU, TPM dan PKAM 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	134 1.888 72.355 856 400 24 43.359	3.026.009.052,00	APBD (DAU)		136 2.077 79.591 942 460 24 47.695	3.328.609.957,20
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Posyandu yang dibina - Jumlah Posbindu PTM yang melaksanakan pelayanan 	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas	75 65	3.596.664.069,00	APBD (DAU)		75 70	3.956.330.475,90

Kode	Usuan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tema penyuluhan dan media promosi dan informasi kesehatan - Jumlah alat dan sarana promosi dan informasi kesehatan - Jumlah desa yang membentuk kader PHBS - Jumlah desa siaga di Kabupaten - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 12 1 set 10 10 24 	<ul style="list-style-type: none"> 216.779.200,00 	APBD (DAU)		<ul style="list-style-type: none"> 12 1 set 12 12 24 	<ul style="list-style-type: none"> 238.457.120,00
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Berpotensi Wabah - Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pembinaan kasus berpotensi KLB - Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi - Jumlah Petugas Surveilans Puskesmas yang mendapat pelatihan pengolahan data - Jumlah Petugas/tracer/kader yang mendapatkan Pelatihan - Jumlah Petugas yang mendapatkan - Jumlah Desa yang mendapatkan spanduk - Jumlah Puskesmas yang melakukan penyelidikan epidemiologi penyakit - Jumlah kasus yang terlacak dan terpantau - Jumlah nakes yang melakukan pemantauan harian pada pasien - Jumlah Puskesmas yang melakukan pemantauan harian pada pasien - Jumlah tracer Puskesmas yang melakukan pemantauan KE - Jumlah petugas surveilans yang melakukan penginputan data - Jumlah nakes yang mendapatkan insentif - Jumlah kegiatan vaksinasi massal - Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Alkes 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya - Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya 	<ul style="list-style-type: none"> 100 24 24 78 191 191 262 525879 191 24 24 48 24 24 24 	<ul style="list-style-type: none"> 25.898.340.418,00 	APBD (DAU)		<ul style="list-style-type: none"> 100 24 24 78 211 211 262 525879 24 24 24 48 48 48 24 	<ul style="list-style-type: none"> 28.488.174.459,80

Kode	Usuan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan vaksinasi covid-19 - Jumlah OJT(On Jobs Training) Peningkatan Imunisasi untuk Petugas dan Kader Puskesmas - Jumlah pelaksanaan imunisasi bayi dan balita di posyandu - Jumlah Desa yang melaksanakan sweeping imunisasi - Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) - Jumlah sarana penyimpanan vaksin dan distribusi vaksin rantai dingin - Jumlah kegiatan Monev survim - Jumlah sekolah yang melaksanakan kegiatan vaksinasi 		24 2 530 262 530 3 78 3					48 3 530 262 530 3 78 3	
1 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan deteksi dini masalah kesehatan jiwa di sekolah dan kelompok masyarakat - Jumlah kegiatan promosi kesehatan jiwa masyarakat - Jumlah Kerjasama dengan dengan SPKJ dalam penanganan orang dengan masalah kesehatan jiwa - Jumlah kegiatan peningkatan SDM penanggulangan masalah kesehatan jiwa di masyarakat 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	4 24 1 PKS 6	371.345.320,00	APBD (DAU)		6 24 1 PKS 6	408.479.852,00	
1 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kegiatan koordinasi lintas program dan lintas sektor pelayanan jiwa dan Napza - Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	1 6	238.494.400,00	APBD (DAU)		1 12	262.343.840,00	
1 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah wilayah yang mendapat pelayanan kesehatan di daerah terpencil - Jumlah SD/MI yang melaksanakan sikat gigi masal 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	9 48	143.750.000,00	APBD (DAU)		9 48	158.125.000,00	
1 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas yang memiliki wilayah rawan bencana melakukan mitigasi bencana - Jumlah Wilayah yang terkena bencana dilakukan pelayanan kesehatan pasca bencana 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	15 15	55.000.000,00	APBD (DAU)		15 15	60.500.000,00	
1 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RT yang melakukan sosialisasi dan Implementasi GARIJ 	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta	100	3.121.591.700,00	APBD (DAU)		120	3.433.750.870,00	

Kode	Ususan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
										4
1	2	3								
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kegiatan Penilaian Eliminasi Malaria - Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans Vektor - Jumlah Rapid HBSaG yang tersedia - Jumlah Vaksin HBIG yang tersedia - Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan PBI daerah - Jumlah peserta BPJS Kelas III mandiri yang mendapatkan subsidi APBD - Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan <i>Telemedicine</i> - Jumlah laporan dan rekomendasi hasil penelitian - Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan layanan sesuai standar - Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan Penilaian Akreditasi - Jumlah Tim PSC 119 Kabupaten yang terbentuk - Jumlah Tim PSC mendapatkan Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan - Jumlah fasilitas Kesehatan Rujukan terintegrasi dengan NCC 119 dan PSC 119 								
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	18.500	9.847.828.142,00	APBD (DAU)	20.500	10.832.610.956,20		
1 02 02 2.02 30	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	9	2.900.000.000,00	APBD (DAU)	14	3.190.000.000,00		
1 02 02 2.02 31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan		Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	1	109.999.829,50	APBD (DAU)	1	120.999.812,45		
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	1	929.298.899,10	APBD (DAU)	1	1.022.228.789,01		
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	10	2.950.414.500,00	APBD (DAU)	12	3.245.455.950,00		
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	1	2.250.000.000,00	APBD (DAU)	1	2.475.000.000,00		
1 02 02 2.02 39				20			40			
1 02 02 2.02 40				1			2			
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi			623.268.712,50			685.595.583,75		
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	- Jumlah petugas yang melaksanakan SIK	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24	204.000.000,00	APBD (DAU)	24	224.400.000,00		
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SIK Daerah	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	8	309.269.614,50	APBD (DAU)	12	340.196.575,95		
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	- Jumlah Petugas SIK di Dinas dan Puskesmas yang sudah dilatih	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	24			24			
1 02 02 2.03 03		- Jumlah Alat/Perangkat SIK dan Jaringan Internet yang di adakan (paket)	Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya	5	109.999.098,00	APBD (DAU)	5	120.999.007,80		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	- Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	837	26.589.381.215,80	APBD (DAU)			34.566.195.580,54
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan SDM - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium	24 11	325.000.000,00	APBD (DAU)		24 13	357.500.000,00
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang diberikan Pelatihan dan Uji Kompetensi			3.304.000.000,00				3.634.400.000,00
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah pelatihan dan pendidikan kesehatan yang diselenggarakan - Jumlah peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan nakes - Jumlah peserta diklat Penguji Uji Kompetensi - Jumlah peserta diklat manajemen Puskesmas - Jumlah peserta diklat Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas - Jumlah peserta diklat Plebotomi - Jumlah peserta diklat K3 - Jumlah peserta diklat Distric Food Inspector - Jumlah peserta diklat mikroskopis ATLM - Jumlah peserta workshop uji komp - Jumlah peserta workshop penyusunan profil SDMK - Jumlah peserta workshop Audit Internal Laboratorium - Jumlah peserta workshop Kelabotorium - Jumlah peserta peningkatan kapasitas nakes dalam PONED - Jumlah peserta magang ke Laboratorium Klinik - Jumlah peserta magang pemantapan mutu di BBLK	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	60 175 30 6 30 6 6 24 69 50 30 6 12 15 2 4	3.304.000.000,00	APBD (DAU)		62 177 32 8 32 8 8 26 71 52 32 8 14 17 4 6	3.634.400.000,00

Kode	Usuran / Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	JUMLAH PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)			519.789.600,00				571.768.560,00
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah validitas perizinan sarana pelayanan kefarmasian			149.901.400,00				164.891.540,00
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah Pengendalian dan Pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian - Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Dinas Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	55	101.200.000,00	APBD (DAU)		60	111.320.000,00
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah sarana yang dilakukan validitas perizinan sarana pelayanan kefarmasian	Dinas Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	54	22.493.900,00	APBD (DAU)		54	24.743.290,00
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Jumlah fasilitasi perizinan sarana pelayanan kefarmasian	Dinas Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10	26.207.500,00	APBD (DAU)		10	28.828.250,00
1 02 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pemberian Sertifikat Produksi Alkes dan PKRT							
1 02 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	- Jumlah Peserta yang memiliki sertifikat produksi Alkes dan PKRT							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3							
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase P-IRT yang mendapatkan sertifikat layak produksi			213.779.500,00			235.157.450,00	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Rumah Tangga dan Nomor P-IRT - Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang mendapatkan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT	Dinas Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan	120	213.779.500,00	APBD (DAU)	120	235.157.450,00	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase hasil pemeriksaan uji laboratorium pada produk makanan minuman industri rumah tangga			156.108.700,00			171.719.570,00	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	- Jumlah sarana IRTTP yang mendapatkan pengawasan - Jumlah sampling dan pengujian Pangan Industri Rumah Tangga Pangan	Dinas Kesehatan dan Industri Rumah Tangga Pangan	80	156.108.700,00	APBD (DAU)	80	171.719.570,00	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Persentase kasus pelanggaran disiplin protokol kesehatan yang diberikan sanksi administratif			400.542.400,00			455.650.880,00	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintasi Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kesehatan masyarakat			150.542.400,00			180.650.880,00	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 - Jumlah Instansi yang berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	55	150.542.400,00	APBD (DAU)	58	180.650.880,00	
							34		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(output) / Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00				165.000.000,00
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah desa yang melaksanakan kluster Germas	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	30	150.000.000,00	APBD (DAU)		35	165.000.000,00
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00				110.000.000,00
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kader Saka Bakti Husada yang dibina	Dinas Kesehatan, Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas beserta jaringannya dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	30	100.000.000,00	APBD (DAU)		40	110.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kesehatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kesehatan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten Ketapang, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V

PENUTUP

- A. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari Visi, misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2021-2026.
- B. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
- C. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
- D. Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Ketapang, 2021

Kepala Dinas Kesehatan



H. RUSTAMI, SKM, M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630512 198511 1 003